

MEDIA TELEVISI SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DEMOKRASI

Abstract

This article explains about the presence of commercials television in Indonesia had many dynamic, especially for political phenomenon. When news has been much consider to one candidate, its mean media become a partisan of political organization. This is so due to fact that mass media now depend mostly on controlled by the owner media who have interest in making good images in public eyes to through political choice.

Keywords : television, Journalist, political media and democratization

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai adanya iklan televisi di Indonesia yang memiliki banyak dinamika, terutama dalam fenomena politik. Bila berita lebih banyak mengarah kepada salah satu kandidat, maka media tersebut sebenarnya menjadi bagian dari partisan organisasi politik. Hal ini terjadi karena media massa sekarang sangat bergantung pada kendali pemilik media yang memiliki kepentingan untuk membuat citra yang bagus untuk menjadikannya pilihan politik bagi publik.

Kata Kunci: Televisi, Jurnalis, Media Politik dan Demokrasi

PENDAHULUAN

Tahun 2017 ini diramaikan dengan adanya berbagai aksi yang menyandingkan kegiatan politik dan kepelemukan agama dari sosok publik figur yang menyita perhatian khalayak. Dimulai dari realita kasus penistaan agama yang dilakukan salah satu pemimpin daerah dan bentuk-bentuk dukungan provokatif yang berbunyi “tidak akan mendukung pemimpin yang agamanya berbeda” dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim ini.

Realita yang diangkat oleh media ini memunculkan ragam tanggapan yang berujung pada keberpihakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat media televisi swasta nasional terlihat sangat kental pemberitaannya yang mendewakan salah satu calon politik masing-masing dengan melihat latar belakang agama. Para peneliti bidang media sudah lama bicara tentang bagaimana sebuah media dikonstruksi, di bingkai (Callaghan & Schnell, 2005) dikemas dan dipabrikasi oleh media dan para pekerjanya (Chomsky, 2002).

Walaupun media tidak dapat dinyatakan netral, namun perlu ada gagasan terkait literasi media yang berfungsi untuk mendidik khalayak. Untuk menjalankan fungsi tersebut diperlukan proses panjang yang tidak dapat dipisahkan, mulai dari liputan, proses editing, dan penyajian berita serta *gatekeeping* yang akan disaksikan oleh khalayak (apabila ditarik garis besar prosesnya). Lalu, media yang dapat dijangkau oleh banyak khalayak, terutama khalayak di Indonesia, dari Sabang-Merauke dengan jangkauan terdalam, terluas, terpencil adalah media televisi sebagai salah satu perwujudan media massa yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan televisi dan industri media yang menaunginya sangat bertumbuh pesat di Indonesia. Pada tahun 2017, hak siar televisi milik swasta sudah melebihi dari 17 saluran (Kominfo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tentu khalayak akan semakin dimanjakan dengan variasi konten acara yang

berasal dari berbagai macam instansi media. Hanya saja dalam tahun dan era yang sama, terdapat dua instansi media yang saling “*head to head*” untuk memberitakan mengenai dinamika politik yang sedang terjadi pada saat ini.

Perilaku yang ditunjukkan oleh media ini tentu tidak baik apabila dikonsumsi oleh khalayak luas. Sebab media melibatkan sosok para politisi dan mengkomodifikasi agama sebagai konten dari pemberitaan di media televisi masing-masing. Kehadiran politisi-politisi yang di media menjadi wacana tersendiri bagi media dalam membingkainya. Media dapat secara eksplisit memberitakan tentang visi misinya dari sosoknya tersebut ataupun menjadi metode kampanye terselubung. Namun bila yang diberitakan adalah latar belakang agamanya, hal ini tentu menjadi persoalan lain.

Fenomena ini tidak lepas dari sejarah panjang pertumbuhan televisi swasta di Indonesia. Munculnya televisi swasta pertama yang diawali RCTI, merupakan kebijakan pemerintah dalam mengakhiri monopoli siaran dari TVRI. Kebijakan ini sering disebut sebagai *open sky* yang merujuk pada Surat Keputusan Menteri Penerangan No.167B/MENPEN/1986 (Hince, 2009). Keputusan tersebut berisi dua pokok kebijakan yaitu izin penggunaan antena parabola dan diperkenalkannya sistem siaran terbatas.

Alasan utama yang dikemukakan atas kebijakan baru tersebut difungsikan sebagai upaya untuk membendung dampak globalisasi, khususnya melalui “*liberan*” program televisi luar negeri yang dipancarkan melalui satelit yang mudah ditangkap parabola dan menjadi tren ditengah masyarakat kala itu. Kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Np.190A/KEP/MENPEN 1987 tentang sistem saluran terbatas, muncul aturan tentang izin penyelenggaraan untuk mengadakan siaran dan ketentuan pihak pelanggan yang menerima siaran dengan peralatan khusus

yaitu *decoder*. Keputusan tersebut berkembang lebih lanjut menuju ijin untuk melakukan siaran nasional seperti sekarang ini.

Penyusunan deskripsi normatif mengenai media massa (khususnya televisi), paling tidak melibatkan dikursus tiga pihak yaitu negara, publik dan pasar. Inter-relasi antar tiga posisi tersebut akan menentukan fakta riil mengenai posisi televisi swasta. Media dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat modern, dan oleh sebab itu tingkat kerumitan isu dalam media menjadi semakin tinggi.

Akan tetapi, bukan ranah politisi untuk mencampuri konten media secara langsung. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disebut dengan kebijakan institusi media. Kebijakan dari institusi media tidak lepas dari potensi pasar yang akan dibidik oleh media tersebut. Politik negara ini menghadirkan pangsa pasar yang menjanjikan dan menarik untuk disimak oleh masyarakat media

Fenomena umum yang bisa dilihat pada masa ini (tahun 2017), pemimpin politik banyak berkomunikasi dengan publik melalui media berita yang bisa mereka kontrol. Media akan berdiri di antara politisi dan konsituennya. Biasanya, politisi akan berbicara pada media, kemudian media akan menyampaikannya ke khalayak. Tentu kontennya akan lebih terfokus untuk mempengaruhi khalayak sebagai pemilih. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana politisi mencoba untuk menciptakan berita yang disukai oleh masyarakat melalui media, namun di lain sisi para politisi tersebut juga berusaha untuk bertindak dan membuat kegiatan yang mempromosikan agenda kampanye yang bersifat memaksa.

Hal ini yang menyebabkan para reporter merasa wajib untuk meliput mereka sebagai bagian dari bahan berita. Walaupun dalam memberitakan ranah yang tidak dapat mengasosiasikan politisi dalam konteks isi berita tersebut. Seperti yang diketahui

bersama bahwa seorang politisi sangat suka apabila dikaitkan dengan kejujuran, kompetensi, elektabilitas yang tinggi serta kebijakannya yang populer.

Posisi televisi swasta menurut Golding dan Murdock (1995) merupakan satu titik di mana tercapai suatu keseimbangan antara kapitalis dan intervensi publik (dalam konteks liberal), demikian pula dengan posisi negara dalam keseimbangan tersebut, apabila dikaitkan dengan konteks ekonomi politik, yang lebih penting adalah bagaimana posisi normatif (teoritis) yang harus dikonseptualisasikan untuk mencapai suatu posisi ideal dan bagaimana seharusnya eksistensi televisi swasta tersebut di Indonesia.

Asumsi televisi swasta sebagai media “baru” pada awalnya telah memiliki kekuatan ekonomi politik. Tidak hanya karena kepemilikannya didominasi oleh satu orang saja, namun sebagai entitas ekonomi, media memiliki posisi tawar yang dapat diperhitungkan baik itu oleh pemerintah maupun oleh industri itu sendiri. Kehadiran industri televisi swasta di Indonesia muncul dalam konteks kebijakan *top-down* lebih dari kebutuhan masyarakat atau publik (Budi, 2003). Wacana yang berkembang dari pertumbuhan industri televisi tersebut lebih mengarah kepada kepentingan ekonomi politik elit penguasa. Oleh sebab itu kepentingan dan kebutuhan publik untuk membangun ruang diskusi publik seharusnya dapat terwakilkan dari kebutuhan yang signifikan, yaitu kebutuhan khalayak.

Tulisan ini akan mengajak untuk melihat bagaimana besarnya pengaruh pengendalian oleh pemilik industri media, khususnya media televisi terhadap apa yang diproduksi oleh media tersebut dan akhirnya dikonsumsi oleh khalayak.

Pada penelitian yang dilakukan Shabira Dwi Fahdilah, Nabila Farahnisa, dkk dalam Jurnal Komunikator edisi Juli 2016 Vol. 8 No. 2, menyatakan bahwa strategi televisi local yakni RBTv yang melakukan

kerjasama dengan televisi nasional KOMPAS TV membuat media massa terhindar dari perubahan kebijakan dan tujuan media, serta homogenitas pemberitaan dan informasi akibat dari diversifikasi media. Namun televisi lokal masih terbentur dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemilik media, diantaranya televisi lokal tidak dapat memberikan informasi tentang proses demokrasi yang terjadi pada level daerah.

Kepentingan yang dimiliki oleh pemilik industri media dapat mengubah pilihan politik yang dimiliki oleh khalayak yang mengkonsumsi konten informasi yang beragam, namun pada kenyataannya, proses itu sangat jarang terjadi dan tidak pernah tercipta ruang untuk masyarakat media dalam memperoleh informasi tentang demokrasi yang jujur dan kompatibel. Oleh karena itu, peran media khususnya dalam televisi yang dikonsumsi masyarakat sekarang ini dalam sistem demokrasi patut dipertanyakan.

PEMBAHASAN

Televisi dan Dinamikanya

Asumsi televisi sudah dipahami sebagai alat kapitalis yang digunakan untuk melanggengkan dominasi kelas tertentu yang berkuasa. Khalayak seolah-olah telah di *setting* oleh kelas yang berkuasa yang memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi-politik, melalui media dan program-programnya, untuk kemudian secara ekonomi politik masuk dalam konsep-konsep mereka. Kehadiran industri televisi berkaitan dengan skala ekonomi yang lebih makro, aspek penting dari hubungan tersebut adalah gagasan apa yang penting dan muncul dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada lahirnya media televisi.

Program acara televisi juga disinyalir tidak menunjukkan suatu nilai yang dikembangkan dalam suatu masyarakat, selain sisi komersialnya saja, beberapa pengamatan atas pemrograman acara televisi dapat diuraikan sebagai berikut (Budi, 2008) :

1. Pemrograman acara televisi sering berlangsung secara musiman, yaitu jika suatu stasiun berinisiatif melakukan trobosan acara dan mulai berkembang akan segera ditiru atau dimodifikasi oleh stasiun lain, contoh yang paling mudah adalah sinetron, kuis, infotainment, dan lain sebagainya.
2. Isi program menampilkan hal-hal yang remeh-temeh, hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan pada acara kuis/infotainment yang tidak memberikan nilai tambah terhadap pengetahuan.
3. Dari aspek jurnalisme masih cenderung berlaku sebagaimana kebanyakan media massa cetak, yaitu “pada dasarnya” isinya sama. Pemberitaan di televisi cenderung mengemas isi yang relatif sama, narasumber sama pada setiap episodenya.
4. *Blocking Time*, oleh *advertiser* untuk iklan maupun program tertentu.

Pada akhirnya dalam mengamati perilaku khalayak dalam mengkonsumsi media tidak ayal seperti melihat kotak-kotak yang beragam, hal ini tidak lepas dari program televisi yang membuatnya menjadi terkotak-kotak seperti sekarang ini. Dikaitkan dengan permasalahan politik yang digandrungi pada tahun ini terlihat bahwa televisi seperti menayangkan hal yang serupa dengan konten yang serupa pula, padahal isu tentang dinamika politik haruslah berimbang, tidak terlalu rata kanan, tidak juga terlalu ke-kiri, hal yang sekarang terjadi adalah media televisi telah memiliki posisi untuk bepihak pada salah satu calon, sesuai dengan kebijakan instansi yang memberlakukannya.

Kita telah mengetahui bersama, salah satu peran media yang sangat vital dan sudah sewajarnya dilakukan oleh pers dalam masyarakat demokratis adalah pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kekuasaan yang absolut dalam masyarakat, fungsi tersebut adalah sebagai pengawas atau pemantau. Pengawas (*watchdog*) terhadap

berbagai lembaga sosial, politik maupun lembaga-lembaga ekonomi.

Hal ini semata untuk tidak melakukan praktek-praktek yang berbau monopoli, tetapi yang terjadi di dunia pertelevisian, adalah hal yang berbeda, dimana fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, walaupun pers digadang-gadang sebagai pilar keempat, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang dimaksudkan untuk melakukan *krsochek* terhadap isu dan permasalahan, pers harus mampu menampilkan laporan-laporan yang bersifat investigatif tentang penyelewengan kekuasaan, atau hal lain yang bersifat penyelewengan, hanya saja saat ini, peran ini tidak terlihat berjalan dengan baik, justru lebih terlihat sebagai fungsi “melegalkan” kebijakan pemilik industri media.

Bagdikian (1997) mengemukakan pemikirannya bahwa walaupun media dimiliki segelintir orang atau perusahaan, namun tetap terdapat suara media yang berada diluar kontrol media besar. Hal ini menyiratkan bahwa institusi media telah tercipta kebijakan yang tidak akan membiarkan suara media itu “bebas” tetapi telah di setting sedemikian rupa untuk tetap berjalan sesuai dengan koridor dan kebijakan yang diberlakukan, hal ini juga berlaku pada jurnalis yang melakukan kerja jurnalistik, tidak dapat sembarang membuat, menampilkan berita, apabila konten berita, tidak disukai oleh manajemen, maka sudah barang tentu berita tersebut tidak akan dimuat oleh industri media.

Jurnalis, Berita Publik dan Politik

Berbicara tentang pemilu, tentunya jurnalis membuat berita publik tentang pemilu bertujuan untuk membuat kandidat secara berkelanjutan untuk terlibat ‘konflik’ lebih jauh atau tidak dengan jurnalis. Hal ini tergantung pada jenis liputan yang disajikan oleh sang jurnlis, tidak lepas dari kepentingan yang akan diminta oleh seorang politisi ataupun kepentingan jurnalis itu sendiri. Di sisi lain pemilih rasional juga berusaha mencari informasi yang bertujuan untuk

membantu dalam membentuk opini atau membuat pilihan yang bijaksana, biasanya pemmasalahan yang kontroversial dan berbau isu akan didahulukan untuk dicari informasinya.

Dengan begitu, masyarakat yang rasional akan sangat konsen terhadap konflik yang alot (termasuk antara politisi dan para jurnalis) indikasinya adalah masyarakat ingin mengetahui kedua sisi yang berbeda, dengan dua pandangan yang berbeda pula. Dengan demikian masyarakat yang memiliki "rasional" akan membatasi perhatian mereka pada politik, jika para elit politik sudah sangat terlibat terlalu jauh pada pertikaian yang dibingkai oleh media (seperti layaknya orang tua yang sedang jengkel dan memarahi anaknya untuk mengurus urusannya sendiri).

Di lain sisi, masyarakat jangan diharapkan sebagai penengah dalam sejumlah isu yang menyangkut pertikaian ideologis, terlebih pertikaian atas dasar kepentingan pribadi sang elit politik. Maka kuatnya demokrasi perluasan pada semua infrastruktur politik (termasuk media) seakan menjadi perpanjangan tangan dari para penguasa sebagai bentuk hegemoni untuk melestarikan ideologi penguasa. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang rasional memiliki dasar pemikiran untuk memilih dan menggunakan hak politik.

Media dan demokratisasi

Hal menarik untuk menjelaskan konsep peran politik yang dilakukan media dengan melihat pemikiran dalam bab yang ditulis oleh pengamat asal Jepang, Susan Pharr, yang menjelaskan adanya empat pandangan yang saling berlawanan yaitu pertama media sebagai penonton (*spectator*); kedua sebagai penjaga (*watchdog*); ketiga sebagai pelayan (*servant*); dan keempat sebagai penipu (*trickster*).

Menarik saat Susan Pharr memiliki anggapan bahwa media sebagai "penipu" yang diartikan bahwa media merupakan partisan aktif dalam proses politik, dampak utamanya

dari peran penipu sebagai pembangun komunitas tertentu. Label ini kemudian berubah menjadi kosakata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan (Pharr, 1996:24-36). Yang dimaksudkan dalam pemikiran Pharr bahwa banyak literatur media di negara berkembang menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara dimana media digunakan sebagai alat propaganda negara.

Hal yang terjadi di Indonesia adalah sangat tercermin dari media masa yang berbentuk televisi dimana mencerminkan dukungan atas kandidat calon pemimpin yang menunjukkan pola kebijakan dari pemilik media. Fenomena ini terjadi pada salah satu media massa yaitu televisi, atau bisa dikatakan televisi menjadi kepanjangan tangan dari perwujudan dukungan (televisi partisan).

Sistem demokrasi yang melingkupinya menjadi sangat tidak berarti dengan munculnya fenomena ini, bisa dikatakan bahwa pihak institusi media dengan ini secara terang-terangan pula menjawab pada sisi yang mana mereka berdiri. Khalayak pun akan menjadi terdampak pertama akan hadirnya televisi ini, dengan mengatasmakan tugas jurnalistik, televisi akan secara habis-habisan memberitakan bahwa calon A baik, calon B tidak baik, artinya tidak berimbang dari segi bobot pemberitaan.

Asumsi utama dalam kajian demokratisasi adalah, semakin *press independent* dan semakin besar kebebasan yang dimiliki maka akan member kontribusi positif pada perubahan politik. Dengan kata lain media dapat memainkan peranan yang sangat besar bagi proses demokratisasi, yaitu sebagai agen perubahan, dengan syarat media mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi politik. Neumann menjelaskan bahwa kebebasan memegang peranan penting di Asia Tenggara, khususnya pada dalam proses liberalisasi politik yang berhubungan dengan munculnya pers yang lebih terbuka dan kritis (Neumann, 1998).

Fenomena televisi yang terjadi sekarang ini nyata terlihat tidak memberikan pendidikan politik yang baik saat sistem sudah berganti. Media massa dalam hal ini seharusnya menjadi media demokrasi, layaknya yang dipaparkan dalam pemikiran Habaermas (1997) tentang konsep lingkungan public (*public sphere*) sebagai ruang sosial (*social space*) untuk artikulasi mengenai masyarakat sipil, yaitu semua tempat fisik dan ruang yang termediasi, dimana diskusi terbuka mengenai masalah kepentingan public dapat dilakukan dengan bebas.

Televisi seharusnya dapat menyediakan hal serupa, dimana tidak terlalu “vulgar” dalam pemberitaan tentang salah satu kandidat dalam perputaran tahun politik yang terjadi, sehingga televisi sebagai salah satu media massa nyata berkontribusi untuk memberikan konten yang merupakan pengejawantahan dari pendidikan politik bagi khalayak dengan berita yang berimbang walaupun sangat bertentangan dengan regulasi yang diberikan oleh pihak pemangku kepentingan ataupun pemilik industri media.

Peran media yang seharusnya diperjuangkan adalah pada sisi kualitas isi pemberitaannya dengan memerhatikan aspek edukasi, khususnya edukasi politik. Menghadirkan konflik memang lazim dilakukan, tetapi konflik yang dengan sumber dan fakta yang mengikat isu tersebut, tidak pada ranah “adu otot” dengan institusi media yang lain.

Sistem demokrasi adalah sistem yang sedang menunjukkan prosesnya bagi replubik ini, tidak jarang banyak sindiran dalam menjalankannya yang dialamatkan kepada elit politik, disinilah seharusnya media berperan dengan memberikan jalan tengah berbentuk penjelasan yang rinci tentang apa-apa saja yang sedang berkembang di dunia politik, sebagai penengah mengatasi isu yang berkembang, bukan menjadi bagian dimana isu tersebut dikembangkan.

Fenomena yang penulis sebutkan di awal tadi baru terjadi saat politik disandingkan

dengan agama yang secara langsung diterima oleh rakyat. Permainan institusi media ini sangat membuat resah dengan pemberitaan yang tidak berimbang pada sosok yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, akibatnya media tersebut dapat menentukan siapa khalayak yang mengkonsumsi kontennya adalah khalayak yang telah secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat calon pemimpin daerah, perilaku tidak sehat inilah yang terjadi saat era pers dinyatakan bebas.

Aspek manajerial-pun akhirnya dipertanyakan didalam prosesnya, sudah sejawarnya komisi milik Pemerintah yang mewakili dan memiliki kewenangan sebagai regulator penyiaran bertindak dengan memberikan peringatan keras, atau bahkan keputusan yang mengingkat agar fenomena ini tidak terulang dan menjadi kebiasaan.

KESIMPULAN

Perubahan kehidupan di dalam industri media sangat dirindukan pasca lepasnya rezim otoriter ke masa ini, tetapi yang terjadi televisi sebagai media massa memberikan wajah baru dengan mengatasnamakan kebebasan, tidak ada aspek pendidikan yang diberikan oleh televisi seperti cita-cita yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mencatumkan beberapa pasal tentang kemerdekaan untuk memperoleh informasi telah diatur didalamnya, begitu pula untuk jurnalis.

Maka penulis berkesimpulan bahwa media diharapkan memiliki keleluasaan gerak politik, tidak hanya menyuarakan dan tunduk pada mekanisme pasar sesuai dengan regulasi yang diberlakukan, namun menjalankan peran politik, dan atau menjadi alat melawan bahkan menggulingkan pemerintahan yang diktator dan dapat berperan mendukung konsolidasi demokrasi, yang merupakan otonomi politik media.

Sepantasnya media bukan hanya menjadi partisan atas kekuasaan dan kekuatan pihak-

pihak tertentu yang akan sangat merugikan bangsa ini dalam melihat suatu fenomena yang telah dibingkai media. Efek terhebat dari perilaku media adalah terbentuknya pemikiran-pemikiran tertentu tanpa adanya proses *gatekeeping* dan pengawasan (*watchdog*) ketika dua aspek itu tidak lagi memiliki taji, informasi yang dihadirkan kepada masyarakat media tidak lagi memiliki bobot yang baik bagi proses edukasi kepada masyarakat tanpa adanya pemberian pendidikan demokrasi terhadap calon pemilih

DAFTAR PUSTAKA

- Bagdikian, Ben H. (1997). *The Media Monopoly 5th ed.* New York : Beacon Press
- Budi, Setio. (2008). *Dinamika Televisi Swasta Indonesia: Kajian Ekonomi Politik TV Swasta Indonesia Dalam Interaksi Kepentingan Negara, Pasar dan Publik*, Thesis - UI
- Fadhilah, Shabira, (2016). *Bertahan di Tengah TV "Nasional" : Strategi Manajemen RBTv Melalui TV Jaringan dengan KOMPAS TV.* dalam Jurnal Komunikator Vol. 8 No. 2, Juli 2016
- Callaghan, K. & Schnell, F. Eds. (2005). *Framming American Politics.* Pittsburgh, PA: University of Pittsburgs Press.
- Habermas, Jurgen (1994), ed. (2004). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society.* Cambridge, MA : MIT Press
- Herman, E., S. & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media.* New York: Pantheon Books.
- Neumann, A., Lin. (1998). *Fredoom takes hold: ASEAN Journalism in Transition.* New York: Committee to Protect Journalist
- Panjaitan, Hinca. (2009). *Memasang Televisi.* Jakarta: Institut Studi Arus Informasi

